

Mungkinkah Koalisi (Tetap) Permanen?

Oleh: Hendra Kurniawan

SEKETIKA pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini muncul tatkala Koalisi Merah Putih mendeklarasikan kesepakatan koalisi permanen untuk lima tahun ke depan. Pertanyaan ini semakin menguat saat menyaksikan pengumuman penetapan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2014-2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 22 Juli 2014 malam.

Koalisi Merah Putih terdiri dari tujuh partai politik pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ketujuh partai politik itu ialah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, dan Partai Demokrat.

Koalisi permanen dideklarasikan pada Senin sore 14 Juli 2014 di Tugu Proklamasi. Di tempat yang sakral sekaligus di bulan yang suci ini, Koalisi Merah Putih menyatakan diri untuk tetap solid, terus bekerja sama, dan saling mendukung untuk lima tahun ke depan. Sebagai kesepakatan bersama yang telah dideklarasikan, maka koalisi ini seyogyanya akan tetap utuh termasuk ketika capres-cawapres yang mereka jagokan kalah. Artinya mereka harus siap untuk tetap satu suara di legislatif nantinya.

Tentu ada banyak pertimbangan yang tidak mudah dalam mengambil keputusan menjadi koalisi yang permanen. Apalagi sudah lama terdengar kabar bahwa besar kemungkinan akan adanya anggota koalisi yang menyeberang ke kubu lain apabila kandidatnya kalah. Partai-partai yang diduga akan menyeberang di antaranya Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai

Demokrat. Akan tetapi yang paling santer mencuat yaitu mengenai sikap Partai Golkar. Sebenarnya persoalan mengalihkan dukungan seperti ini sah-sah saja karena dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun tentunya etika politik masih perlu diperhatikan pula.

Galau menjadi oposisi

Sejak Golkar (Golongan Karya) berdiri dan turut serta dalam pemilu, Golkar selalu menempatkan dirinya pada kubu penguasa. Mulai pemilu pertama masa Orde Baru tahun 1971 hingga Pemilu 1997, Golkar selalu tampil sebagai pemenang. Otomatis selama sekitar tiga dekade Golkar dengan mudah menguasai legislatif maupun eksekutif. Memasuki masa Reformasi, dalam Pemilu 1999, sekalipun Golkar mendapat tekanan hingga muncul tuntutan untuk dibubarkan namun Golkar masih memiliki pemilih dengan ikatan batin yang kuat.

Saat itu Golkar yang kemudian menabalkan dirinya lahir baru harus bersaing menghadapi partai-partai politik lainnya yang bermunculan. Kenyataannya Partai Golkar masih berhasil meraih suara terbanyak kedua, sehingga di era baru pun, Partai Golkar tetap berada pada posisi menentukan. Harus diakui pengalaman tokoh-tokoh dari partai ini dalam pemerintahan tidak dapat disingkirkan begitu saja. Bertahun-tahun banyak posisi menteri yang dipegang oleh para elite dari Partai Golkar.

Dalam Pemilu 2004, Partai Golkar tidak berhasil memenangkan pasangan Wiranto-Sholahuddin Wahid. Kegagalan ini membuat Partai

Golkar dalam pilpres putaran kedua mengalihkan dukungannya pada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK). Pasangan ini menang sehingga otomatis Partai Golkar berada dalam lingkaran koalisi pemerintahan. Demikian pula saat Pemilu 2009, Partai Golkar kembali satu atap dalam koalisi bentukan SBY dan menempatkan tokoh-tokohnya dalam kabinet.

Mencermati rentetan panjang perjalanan ketatanegaraan Republik ini, maka sejarah telah mencatat bahwa Partai Golkar belum pernah berada di luar pemerintahan. Seakan menjadi tradisi untuk tidak beroposisi, maka dalam pilpres kali ini ketika muncul dua calon yang sama-sama kuat, Partai Golkar sempat terombang-ambing. Pada akhirnya Partai Golkar di bawah Aburizal Bakrie memutuskan berlabuh pada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Diduga keputusan ini bukan sekedar hitung-hitungan politik, namun sarat kepentingan.

Hal yang lantas mengganjal yaitu Joko Widodo ternyata menggandeng Jusuf Kalla yang notabene juga pernah aktif dalam jajaran pengurus teras Partai Golkar, bahkan pernah menjadi ketua umumnya. Selain itu dalam pilpres putaran kedua tahun 2004, Partai Golkar juga memberikan dukungan yang solid pada Jusuf Kalla. Tak heran apabila beberapa fungsionaris Partai Golkar, terutama kader mudanya, terang-terangan menentang keputusan Aburizal Bakrie dan memilih untuk memberikan dukungan pada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal ini kemudian disikapi cukup tajam oleh Aburizal Bakrie yang sempat memberi keyakinan bahwa dalam tubuh Partai Golkar mulai terpecahan.

Perlu ditekankan lagi bahwa politik sangat fleksibel, maka di sini saja Partai Golkar kali ini memang serius ingin mencoba beroposisi. Akan tetapi perlu ditilik kembali bahwa salah satu visi Partai Golkar adalah terwujudnya negara kesejahteraan 2045. Menurut keyakinan beberapa fungsionaris Partai Golkar, visi ini tidak akan tercapai tanpa kekuasaan sehingga jalan satu-satunya ialah bergabung dengan kelompok pemenang. Ditambah lagi muncul wacana panas untuk segera menyingkirkan Aburizal Bakrie dari kursi ketua umum partai pasca pilpres sebagai bentuk kekecewaan para kadernya. Jika ini terjadi maka ketua umum baru yang terpilih boleh saja umumkan koalisi dengan Aburizal Bakrie dan mengajal jalan lain.

Penulis sepakat dengan pendapat pengamat yang menyebut bahwa koalisi permanen sebenarnya sangat temporer dan berpotensi bubar di tengah jalan. Koalisi permanen diduga hanya untuk mengamankan posisi politik jangka pendek. Akan tetapi andaikata koalisi ini jalan terus, maka sangat disayangkan apabila hanya menjadi sarana untuk menjegal pemerintah baru yang terpilih. Lupakan politik kepentingan! Bagaimanapun nasib bangsa berada di tangan kita bersama, bukan hanya aku atau kamu, koalisi ini akan itu! ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta